

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH, DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Lian Arke Mokorowu¹, Debby Ch. Rotinsulu², Daisy S.M. Engka³
lianarkemokorowu@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Univeristas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa tenggara. Dianalisis secara sendiri-sendiri pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen maupun dianalisis secara bersama-sama. Menurut Suparmoko Pendapatan Asli Daerah (PAD). berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan lainnya yang sah. Adapun PAD terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN, sedangkan menurut UU no 32 2004 dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999, DAK dialokasikan dari APBN pada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus tergantung pada ketersediaan dana APBN. PAD, DBH, DAU dan DAK dalam pembiayaan pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis menggunakan data sekunder dari berbagai instansi terkait sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan maka PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di minahasa tenggara.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The economic growth of Southeast Minahasa Regency is moving in a more dynamic direction and is an impact of the significant development of PAD, DBH, DAU, and DAK. Economic growth in Southeast Minahasa Regency ranges from 6% -7% annually. This study aims to prove empirically the effect of local revenue, revenue sharing, general allocation funds and special allocation funds on economic growth. This study took the population of Southeast Minahasa Regency. From the Library Research and Internet Research method, it was obtained 135 villages in 12 districts in Southeast Minahasa Regency as samples during the period 2008 - 2017. The analysis uses the multiple regression analysis method. This model tests the direct effect of local revenue (PAD), revenue sharing. (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) for Economic Growth. This model shows that the effect of local revenue (PAD) has a

positive and significant effect on economic growth. The effect of Revenue Sharing (DBH) has a positive but insignificant effect on economic growth. The effect of the General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant effect on economic growth. The effect of the Special Allocation Fund (DAK) has a positive but insignificant effect on economic growth. Furthermore, jointly / simultaneously Local Original Income (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) have a positive and significant effect on Economic Growth in Southeast Minahasa Regency.

Keywords: *Original Local Revenue, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kuznets dalam Sukirno (1995), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode selanjutnya. Menurut Sukirno (2004), tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara dapat diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah beserta masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pemerintah swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru untuk dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses tersebut mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antardaerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan PAD, DBH, DAU, dan DAK yang cukup signifikan di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membuat perekonomian juga ikut bergerak ke arah yang lebih dinamis, sehingga menimbulkan minat dari pelaku usaha maupun pemodal untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka kajian dari penelitian ini penulis mengangkat judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara”***.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bagi masyarakat akademisi, sebagai salah satu referensi penelitian dan sebagai pengembang ilmu pengetahuan.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sejak diberlakukannya UU mengenai perimbangan keuangan daerah, maka daerah dapat mengelola keuangan dengan kewenangan yang lebih untuk mengatur keuangan dan pengeluaran/pembelanjaan daerahnya. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004:213).

Sedangkan menurut Suparmoko, Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (revenue sharing) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran

Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota. $DAU \text{ Provinsi} = \text{jml DAU seluruh provinsi} \times \text{bobot daerah provinsi yang bersangkutan}$ bobot seluruh daerah provinsi. $DAU \text{ Kab/Kota} = \text{jml DAU seluruh kab/kota} \times \text{bobot daerah kab/kota yang bersangkutan}$ bobot seluruh daerah kab/kota.

Mekanisme perhitungan DAU dildalam pertimbangan otonomi daerah dilakukan pertama kali secretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah (DPOD). Selanjutnya DPOP merekomendasikan hasil perhitungan tersebut kepada presiden untuk disahkan melalui keputusan presiden (Kepres) sebelum disampaikan kepada presiden, sebelumnya DPOP berkonsultasi dengan DPR. Penyaluran DAU dilakukan oleh menteri Keuangan melalui ditjen anggaran secara berkala setiap bulan 1/12 dari total DAU perdaerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 angka 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

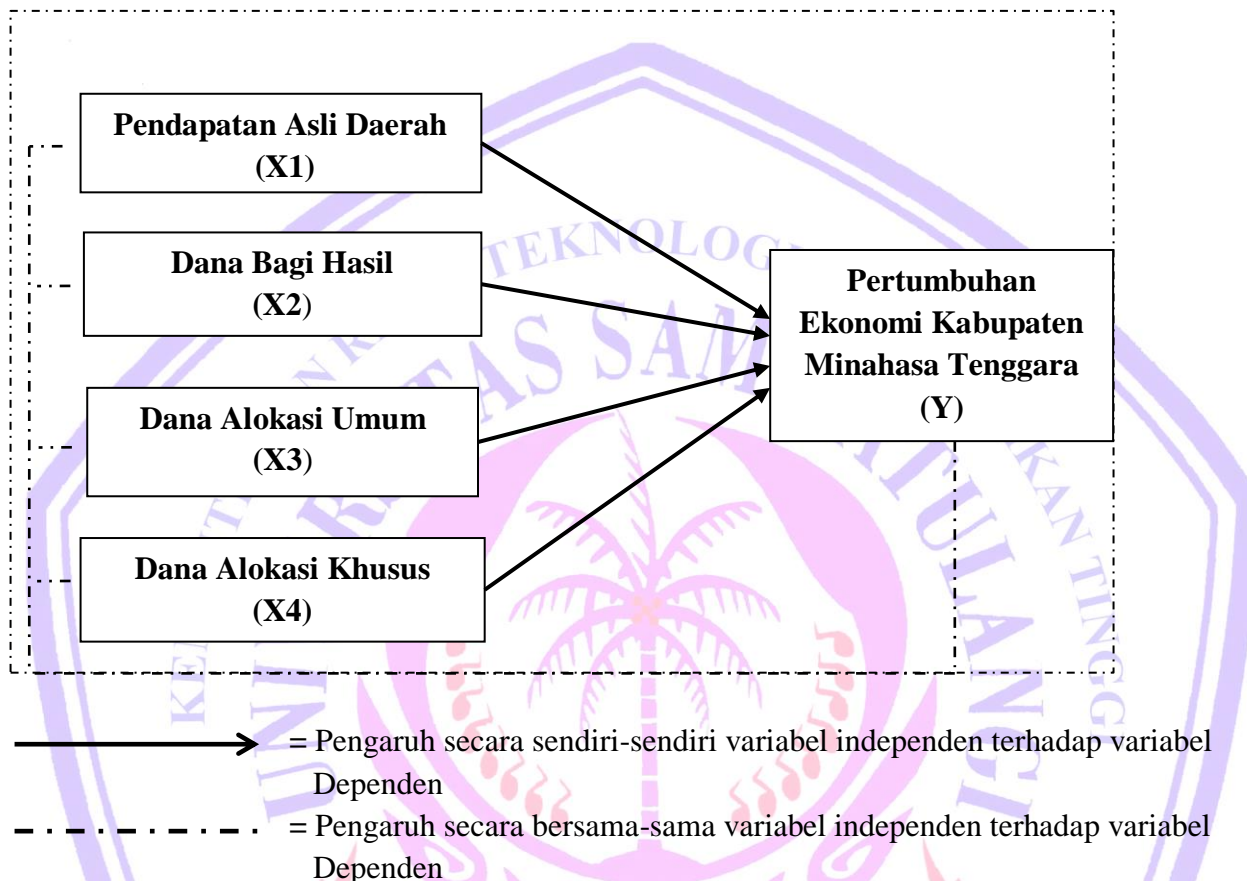
Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Menurut Ahmad Subekan (2012: 88), DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi

barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2004).

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Diduga terdapat pengaruh antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Diduga terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Diduga terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Diduga terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan Kabupaten Minahasa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id), Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara dan jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan waktu penelitian adalah tahun 2008-2017.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)
Penelitian melalui beberapa buku bacaan, literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. *Internet Research*
Penelitian melalui website untuk memperoleh teori dan data dalam penelitian ini.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. PAD diukur dalam satuan Rupiah.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH diukur dalam satuan Rupiah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya target DAU yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. DAU diukur dalam satuan Rupiah.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK diukur dalam satuan Rupiah.

Variabel Dependen:

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional., pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari nilai PDRB. Nilai PDRB dinyatakan dalam satuan Rupiah.

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*). Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisa. Tujuannya adalah untuk mengukur parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas (variabel independen) mampu menjelaskan variabel terikat (variabel dependen) dan memiliki pengaruh kepadanya. Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat (variabel dependen), sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas (variabel independen).

Model ini memperlihatkan hubungan dua variabel. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8.0*. Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat melalui persamaan fungsi:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Fungsi di atas kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X ₂	= Dana Bagi Hasil (DBH)
X ₃	= Dana Alokasi Umum (DAU)
X ₄	= Dana Alokasi Khusus (DAK)
α	= Konstanta/ Intercept
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

Dalam penelitian ini meliputi pengujian serempak (uji-f), pengujian individu (uji-t) dan pengujian ketepatan perkiraan (R²) dan uji asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Estimasi Model Penelitian

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Estimasi PAD, DBH, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	34.54766	0.148998	0.5517
LOG(PAD)	0.297883	0.650112	0.0868
LOG(DAU)	11.96404	0.65609	0.0476
LOG(DAK)	0.11196	0.04271	0.968
LOG(DBH)	4.676266	0.137421	0.8973
$R^2 = 0.66305$			
F-statistik = 4.748774			0.003604

Sumber : Data diolah (Lampiran), 2020.

Uji t-statistik

Uji t dikenal terhadap uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel atau terhadap melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Cara menentukan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (4+1) = 5$.

Hipotesis:

- $H_0 = X_1 - X_2 - X_3 - X_4$
Tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).
- Ada pengaruh secara parsial variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut:

- Jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima
- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak kriterianya adalah sebagai berikut:

- Jika Signifikan $\leq 0,05$ maka berpengaruh signifikan
- Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

1. Pengaruh Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 diperoleh nilai t hitung sebesar $0,650112 > t \text{ tabel } 2.015$ menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh linier variabel independen PAD terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien PAD $0,297883$ menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan nilai signifikasinya adalah sebesar $0,0868 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Variabel Independen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 diperoleh nilai t hitung sebesar $0,137421 < t \text{ tabel } 2.015$ menerima H_0 dan menolak H_1 . Artinya tidak ada pengaruh linier variabel independen DBH terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh nilai DBH secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar $4,676266$ dimana nilai signifikasinya adalah sebesar $0,8973 > 0,05$ tidak signifikan.

3. Pengaruh Variabel Independen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 diperoleh nilai t hitung sebesar $0,65609 > t \text{ tabel } 2.015$ menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh linier variabel independen DAU terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh nilai DAU secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar $11,96404$ dimana nilai signifikasinya adalah sebesar $0,0476 < 0,05$ berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Variabel Independen Dana Alokasi Umum (DAK) dan Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,04271 > t \text{ tabel } 2.015$ menolak H_0 dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh linier variabel independen DAK terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh nilai DAK secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar $0,04271$ dimana nilai signifikasinya adalah sebesar $0,968 > 0,05$ tidak signifikan.

Uji F

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 dapat dijelaskan pengaruh variabel variabel independen PAD, DBH, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi. Cara menghitung nilai *degree of freedom* terhadap ketentuan numerator ($n1$) : Jumlah Variabel – 1 atau $5 - 1 = 4$, dan denominator ($n2$) : jumlah kasus-jumlah variabel atau $10 - 5 = 5$.

Hipotesis:

- $H_0 = X_1 - X_2 - X_3 - X_4$

Tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

- $H_1 = X_1-X_2-X_3-X_4$

Ada pengaruh secara simultan variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak kriterianya adalah sebagai berikut:

- Jika Signifikan $\leq 0,05$ maka berpengaruh signifikan
- Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Nilai F statistik yang diperoleh $4,748774 > F_{tabel} 5.19$. Dengan taraf signifikan $0,003604 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak H_0 dan menerima H_1 atau dengan kata lain variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Determinasi R^2

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,66305 atau 97,5%, yang menandakan bahwa keempat variabel independent tersebut memberikan pengaruh sebesar 97,5% terhadap variabel dependent. Sedangkan sisanya sebesar 2,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Artinya, bahwa keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan dalam penurunan maupun kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara, akan tetapi banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan metode Correlation matrix akan menampilkan nilai korelasi di antara variabel-variabel bebas. Jika korelasi antarvariabel-variabel bebas tersebut $> 0,80$ maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dengan metode Correlation matrix menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

	PAD	DBH	DAU	DAK
PAD	1.000000	-0.372939	-0.042304	-0.492221
DBH	-0.372939	1.000000	0.343551	0.522340
DAU	-0.042304	0.343551	1.000000	0.656101
DAK	-0.492221	0.522340	0.656101	1.000000

Sumber : Data diolah (Lampiran), 2020.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat nilai antara variabel-variabel bebas yang di dapat < 0.80 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 3 Uji autokorelasi

$R^2 = 0,975139$
chi squares = 9,794500
Probabilitas Chi squares = 0,0440

Sumber : Data diolah (Lampiran), 2020.

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,979450. Nilai chi squares hitung (X^2) sebesar 9,794500 sedangkan nilai probabilitas Chi Square sebesar 0,0440 < 0,05 maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

$R^2 = 0,671106$
Obs* R-squared = 6,711058
Probabilitas Chi Square = 0,1520

Sumber: Data diolah (Lampiran), 2020.

Dari tabel 4 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,671106. Nilai Chi-squares hitung sebesar 6,711058 yang diperoleh dari informasi Obs* R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan R^2). Nilai Probabilitas Chi Square sebesar 0,1520 > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas, dapat dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pengaruh masing-masing variabel independent (bebas) terhadap variabel dependent (terikat), antara lain : Pengaruh PAD (X_1), DBH (X_2), DAU (X_3) dan DAK (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nilai Uji-t secara parsial atau individu individu variabel PAD, DBH, DAU dan DAK yang nilainya positif dan hanya PAD dan DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar pendapatan suatu daerah maka akan semakin besar pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sedangkan untuk variabel DBH dan DAK hasil

analisis menunjukkan bahwa yang nilainya positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Fakta atau kondisi lapangan yang terjadi, mengindikasikan jika pengalokasian realisasi DBH dan DAK kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, seperti pembangunan fasilitas sarana publik (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung menyentuh atau dinikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Dana Alokasi Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sepenuhnya leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya, yang antara lain berupa: pembangunan sarana dan prasarana dasar (fisik ataupun non-fisik) yang ikut andil dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara yang optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara kemungkinan besar disebabkan sifat dari DAK yaitu sebagai *specific grants*. Penggunaan DAK ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10%. Pemberian DAK sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur daerah yang belum tentu menjadi prioritas pemerintah daerah tersebut pada tahun anggaran berjalan.

Hasil analisis penelitian ini yang menunjukkan bahwa hanya PAD dan DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan, DBH dan DAK terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi terdapat kesamaan penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dilakukan oleh Mohammad Azis (2008), dalam sebuah jurnal yang berjudul "Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau". Hasil dari penelitian tersebut bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal dalam proses pertumbuhan ekonomi, sedangkan DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel DAK pada hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lily Kusumawat dan I Gusti Bagus Wiksuana dengan judul Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Dalam jurnal penelitian tersebut Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Berbeda dengan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara yang tidak berpengaruh signifikan dan bertanda negatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Ordinary Least Squares* pada penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) bertanda positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) bertanda positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Selanjutnya secara bersama-sama / simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan lebih mengoptimalkan penggunaan DBH dan DAK untuk mendanai setiap kebutuhan daerah agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel lain dan memperpanjang rentang periode penelitian sebagai salah satu cara mengembangkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad (2004). Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga; Jakarta.
- Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah. Edisi pertama, Yogyakarta, Andi.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.